
GENDER DALAM PROGRAM VARIETY SHOW: TINJAUAN TERHADAP REPRESENTASI DAN ISU-ISU GENDER DI MEDIA PENYIARAN INDONESIA

Diego¹, Annisa Annindya²

Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: diego@soc.unand.ac.id

Diterima: 09 Februari 2025

Direvisi: 20 Februari 2025

Disetujui: 25 Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji representasi gender dalam program variety show di televisi Indonesia, dengan fokus pada marginalisasi perempuan serta peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis dokumen sebagai teknik utama pengumpulan data. Sumber data utama berasal dari laporan resmi *Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022* yang diterbitkan KPI, yang mengevaluasi berbagai program televisi—termasuk variety show—berdasarkan indikator seperti kepatuhan terhadap norma kesopanan, perlindungan anak, dan representasi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak variety show masih mereproduksi stereotip gender tradisional, melalui objektifikasi seksual terhadap perempuan, humor seksis, serta penempatan perempuan dalam peran-peran yang emosional dan dekoratif. Representasi ini memperkuat logika *male gaze*, yang menempatkan perempuan sebagai objek visual dan bukan sebagai subjek aktif. KPI memang telah memberikan sanksi kepada beberapa program yang melanggar standar siaran, namun pengawasan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh bentuk seksisme simbolik yang lebih halus dan sistemik. Perempuan jarang ditampilkan dalam peran intelektual atau otoritatif, dan lebih sering dimunculkan dalam narasi yang mendukung norma gender konservatif.

Kata kunci: representasi gender, variety show, KPI, *male gaze*, analisis dokumen, televisi Indonesia

Abstract

This study examines gender representation in Indonesian television variety shows, with a particular emphasis on the marginalization of women and the regulatory role of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in overseeing broadcast content. Employing a qualitative approach, the research adopts document analysis as its primary method of data collection. The main data source is the official 2022 Television Broadcast Program Quality Index published by KPI, which evaluates a range of television programs—including variety shows—based on indicators such as compliance with decency standards, child protection, and gender representation.

The findings reveal that many variety shows continue to reproduce traditional gender stereotypes, notably through the sexual objectification of women, sexist humor, and the placement of female figures in emotional or decorative roles. These forms of representation reinforce the logic of the male gaze, positioning women as passive visual objects rather than active subjects. Although KPI has issued sanctions against certain programs that violate broadcast standards, its oversight remains largely reactive and fails to address the more subtle and systemic forms of symbolic sexism. Women are rarely portrayed in intellectual or authoritative roles and are instead often embedded within narratives that reinforce conservative gender norms.

Keywords: gender representation, variety show, KPI, *male gaze*, document analysis, Indonesian television

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, bahasa, dan keragaman sosial, telah melahirkan berbagai bentuk ekspresi budaya populer, termasuk dalam industri media dan penyiaran. Salah satu bentuk hiburan yang mendapat tempat khusus di hati masyarakat adalah program variety show. Keanekaragaman isi dan bentuk acara ini, yang meliputi segmen-segmen seperti komedi, musik, tarian, permainan, talk show, hingga pertunjukan bakat, tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga menunjukkan dinamika minat penonton yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan generasi.

Variety show, sebagai format hiburan yang fleksibel dan multi-segmen, berfungsi tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai wahana penyampaian nilai-nilai sosial, budaya, dan bahkan politik. Dalam setiap episodenya, program ini menyuguhkan kombinasi hiburan yang mencakup dialog santai, wawancara mendalam, hingga permainan interaktif yang dirancang untuk menarik keterlibatan emosional dan intelektual penonton (Bignell, 2005). Melalui keberagaman narasumber—mulai dari selebritas, ahli, figur publik, hingga individu dengan cerita inspiratif—variety show mampu menjangkau spektrum penonton yang luas dan beragam.

Namun, di balik tampilannya yang ringan dan menghibur, variety show memiliki potensi untuk mereproduksi ideologi tertentu, termasuk dalam hal representasi gender. Seiring dengan makin menguatnya kritik terhadap representasi perempuan dalam media. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa perempuan dalam tayangan televisi masih sering direpresentasikan secara stereotipikal—baik sebagai figur yang pasif, emosional, hingga objek seksual (Lauzen, Dozier, & Horan, 2008; Hether & Murphy, 2010). Representasi ini tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang timpang, tetapi juga memperkuatnya

secara simbolik. Salah satu konsep penting dalam memahami bagaimana tubuh dan identitas perempuan direpresentasikan secara visual adalah **male gaze**—sebuah kerangka kritik yang diperkenalkan oleh Laura Mulvey (1975) untuk menjelaskan bagaimana media, khususnya sinema dan televisi, cenderung membingkai perempuan dari sudut pandang laki-laki heteroseksual.

Dalam konteks variety show Indonesia, *male gaze* hadir dalam berbagai bentuk: dari penggunaan kamera yang menekankan penampilan fisik aktris, narasi yang mengeksploitasi aspek privat dan emosional perempuan, hingga pelibatan perempuan sebagai objek humor seksis. Representasi visual ini bekerja tidak netral; ia membentuk norma gender melalui citra yang berulang dan direproduksi secara luas oleh media arus utama. Seperti dijelaskan oleh Gill (2007), budaya media pasca-feminis justru sering mengemas eksploitasi perempuan dalam bingkai agensi semu, sehingga menutupi relasi kuasa yang tetap tidak setara.

Dalam konteks inilah, program variety show perlu diposisikan bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasi sosial yang mendukung kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk mengonstruksi makna dan membentuk realitas sosial (Couldry & Hepp, 2017). Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam variety show harus melampaui peran dekoratif atau pelengkap, menuju representasi yang mencerminkan kapasitas intelektual, profesional, dan keberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mendukung transformasi ini, lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa konten siaran mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan gender. Pemantauan yang ketat terhadap konten, serta penggunaan indikator-indikator kualitas siaran seperti *Indeks Kualitas Program*

Siaran Televisi, menjadi langkah penting dalam memastikan media penyiaran turut berkontribusi pada pembangunan budaya yang adil gender.

Kesetaraan gender adalah landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan media memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan menyediakan platform yang inklusif dan mendukung. Media penyiaran dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin. Karenanya penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Lembaga pengawas media penyiaran untuk memastikan bahwa konten yang disajikan dalam variety show sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dalam konteks inilah, peran **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)** menjadi penting untuk dikaji secara kritis. Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi isi siaran televisi, KPI memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa tayangan tidak hanya memenuhi standar normatif seperti kesopanan dan perlindungan anak, tetapi juga menjunjung prinsip kesetaraan gender. Meski KPI telah menerbitkan *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)* dan rutin melakukan penilaian melalui *Indeks Kualitas Program Siaran Televisi*, pengawasan terhadap konten yang mereproduksi *male gaze* dan seksisme halus masih minim, bahkan nyaris absen. KPI cenderung reaktif terhadap pelanggaran moral eksplisit, tetapi belum memiliki perangkat analitis yang memadai untuk membaca bias gender implisit dalam format hiburan populer seperti variety show.

Penelitian ini berangkat dari urgensi tersebut, dengan menempatkan variety show sebagai arena penting dalam reproduksi sekaligus potensi transformasi representasi gender di media penyiaran Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana representasi gender dalam program variety show ditampilkan,

bagaimana mekanisme visual dan naratif berperan dalam mereproduksi ketimpangan gender, serta bagaimana peran KPI sebagai regulator dapat (atau gagal) dalam mengintervensi dinamika ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Sumber data utama berasal dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu *Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022*. Laporan ini memuat penilaian menyeluruh terhadap berbagai program siaran televisi, termasuk variety show, yang dianalisis berdasarkan sejumlah indikator, seperti kepatuhan terhadap norma kesopanan, perlindungan anak, serta representasi gender dalam tayangan.

Pendekatan analisis dokumen dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana televisi, sebagai media arus utama, menyampaikan representasi gender dalam program-programnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode sistematis yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dari dokumen yang relevan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Melalui laporan KPI, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola representasi gender yang muncul, serta mengevaluasi sejauh mana media penyiaran mendukung kesetaraan dan keberagaman gender dalam kontennya.

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memahami tanggapan regulator terhadap pelanggaran prinsip kesetaraan gender dalam tayangan, termasuk bentuk-bentuk teguran dan sanksi yang diberikan. Analisis ini dilengkapi dengan kajian literatur dari sumber-sumber akademik terkait representasi gender di media, untuk memperkuat interpretasi data dan menyusun argumen yang kontekstual.

Dengan menggunakan dokumen otoritatif dan data kuantitatif dari lembaga regulator nasional, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi representasi gender di media penyiaran Indonesia dan implikasinya terhadap masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Penyiaran dalam Kesenjangan Gender

Mengapa perlu untuk menempatkan gender sebagai pertimbangan dalam membuat konten tayangan di televisi? Media bukan hanya sebuah hiburan semata, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan pandangan, nilai-nilai, dan persepsi masyarakat. Menurut McQuail dalam Rusadi (2002) media massa memiliki peran sebagai alat ideologi yang bisa menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status serta mendefinisikan realitas. Menurut Bennet yang dikutip oleh Hidayat (2015), media massa tidak hanya sebatas penyalur pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan, bias dan pemihakannya. Dalam konteks ini, program-program *variety show* memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam membentuk sikap, pemikiran, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan kualitas program *variety show* agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Acara *variety show* di televisi, ketika dilihat dari perspektif domain gender, seringkali mencerminkan dinamika yang kompleks dalam representasi gender dan peran gender di media. Beberapa tanyangan *variety show* cenderung memperkuat stereotip gender yang sudah ada dalam masyarakat. Misalnya, mereka mungkin menonjolkan perempuan sebagai objek seksual atau menggambarkan peran gender yang sangat tradisional, seperti perempuan yang hanya berfokus pada kecantikan atau

pria yang hanya berperan sebagai "laki-laki maskulin." Ini dapat memperkuat pandangan yang sempit tentang peran gender yang seharusnya lebih beragam.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mosse (2007:2-3), gender dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang merupakan hasil interpretasi biologis oleh budaya, ajaran nenek moyang, atau hasil dari persetujuan kolektif dalam suatu komunitas tertentu. Dalam hal ini, gender adalah sebuah wilayah terkhusus yang mencerminkan bagaimana pandangan dan pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, peran media dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang gender, terutama dalam konteks perempuan, memiliki implikasi yang mendalam terhadap bagaimana perempuan diperlakukan, dipersepsikan, dan diharapkan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, gambaran ideal tentang laki-laki dan perempuan, termasuk persepsi tentang siapa mereka sebenarnya atau seharusnya menjadi seperti apa, sering kali dipengaruhi oleh proyeksi media. Media cenderung menciptakan representasi yang lebih tradisional tentang peran gender, di mana perempuan dan anak perempuan sering digambarkan dalam konteks kehidupan rumah tangga, emosi, dan aspek penampilan, sementara laki-laki dan anak laki-laki sering dipublikasikan sebagai individu yang cenderung terlibat dalam tindakan fisik, pekerjaan, dan konstruksi. Tidak hanya dalam program TV dan drama, namun juga dalam iklan, kita sering menemui gambaran-gambaran stereotip laki-laki dan perempuan.

Penggambaran perempuan dalam media juga tercermin dalam pandangan yang dianut oleh masyarakat tentang peran gender dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, penelitian dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung memiliki pandangan yang lebih rendah terhadap kemampuan mereka dalam bidang sains, yang bisa mempengaruhi minat mereka dalam

mengejar karir ilmiah. Selain itu, perempuan seringkali kurang terwakili dalam profesi yang secara tradisional dianggap sebagai profesi laki-laki, yang sering kali memiliki prestise sosial yang lebih tinggi. Ini dapat tercermin dalam apa yang disebut sebagai segregasi horizontal, yaitu pola di mana perempuan cenderung memilih pekerjaan atau profesi tertentu yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka, sementara profesi yang dianggap sebagai "laki-laki" tetap didominasi oleh laki-laki (Cohen dan Hilgeman, 2006).

Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa media memainkan peran penting dalam mendorong perilaku pro-sosial. Hasil-hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perubahan dari peran gender yang tradisional menuju representasi gender yang lebih setara dalam konteks kehidupan rumah tangga dan profesional dapat mempengaruhi perilaku pro-sosial anak-anak. Hal ini dapat meningkatkan toleransi mereka terhadap perbedaan gender, mendorong tanggung jawab rumah tangga yang merata, serta memengaruhi kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari secara lebih positif dan produktif. Dengan demikian, peran media dalam membentuk pandangan anak-anak tentang gender dan menginspirasi perubahan positif dalam perilaku sosial mereka sangat signifikan dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Berkaitan dengan aspek perlindungan anak-anak dan remaja, Sali Susiana (2016) menjelaskan bahwa gender tidak dipengaruhi oleh seksualitas atau jenis kelamin, namun kondisi setara yang diperlakukan antara perempuan dengan laki-laki. Kesadaran mengenai isu gender merupakan hal yang perlu diperlihatkan kepada Masyarakat. Erna Surjadi (2011) juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan bentuk hak yang sama dalam mengakses banyak hal antara perempuan dan laki-laki. Tidak dapat dipungkiri stereotipe yang masih berjalan saat ini dikalangan masyarakat secara tidak langsung juga diperlihatkan oleh beberapa

media yang masih belum paham akan kesetaraan gender. Sifat media yang mampu mempengaruhi khalayak tentu menjadi dampak buruk ketika media tidak mampu memberikan contoh tentang kesetaraan gender.

Gender dan Indeks Kualitas Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang berperan penting dalam mengatur urusan penyiaran sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat [2] UU Penyiaran. Salah satu tugas utama yang diemban oleh KPI adalah melakukan pengawasan secara cermat agar program televisi menjadi lebih baik dan berkualitas. Hal ini termasuk dalam upaya untuk memastikan bahwa program-program televisi mencerminkan standar tinggi dalam hal konten, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan isu-isu gender. KPI berkomitmen untuk memantau program-program televisi guna memastikan bahwa mereka menghormati dan mendukung persamaan gender, menghindari diskriminasi, dan mempromosikan representasi yang seimbang dari perspektif gender

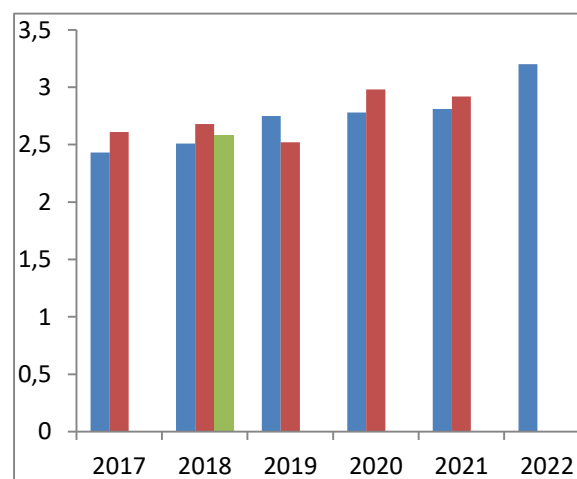
Salah satu tanggung jawab penting KPI adalah memastikan bahwa representasi gender dalam *variety show* dan program-program lainnya di media penyiaran mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ini mencakup pemantauan konten yang dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi masyarakat tentang peran gender dalam masyarakat. Dengan demikian, KPI harus memastikan bahwa *variety show* tidak hanya menghibur tetapi juga mendukung representasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, menghindari stereotip gender, dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. KPI juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pedoman dan memberlakukan sanksi terhadap stasiun televisi atau *variety show*

yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam konteks siaran. Retina (2023) menemukan bahwa beberapa *variety show* yang melanggar norma kesopanan dan kesopanan serta diskriminasi gender mendapat teguran langsung oleh KPI, mulai dari teguran secara tertulis, hingga pemberhentian penyiaran. Hal ini sejalan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

KPI sebagai Lembaga yang mengawasi tayangan di media penyiaran Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan riset tentang kualitas tayangan televisi di Indonesia sebagai tolak ukur kualitas penyiaran di Indonesia. Riset kualitas penyiaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini melibatkan penggunaan sampel program *talkshow* dari setiap saluran televisi swasta di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah bagaimana pembagian gender ditampilkan dalam acara *variety show*. Analisis tersebut mencakup sejumlah elemen, seperti perbandingan jumlah presenter laki-laki dan perempuan, peran serta partisipasi perempuan dalam segmen-segmen tertentu, serta cara perempuan dan laki-laki diwakili dalam berbagai konten acara. Seringkali konten *variety show* memiliki ketidakseimbangan dalam partisipasi antara pria dan perempuan. Ini bisa tercermin dalam jumlah pembawa acara, peserta, atau penampil, yang dapat mempengaruhi representasi gender dalam acara tersebut. Ketidakseimbangan ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam eksposur dan peluang bagi individu dari berbagai gender.

Hasil dari indeks kualitas program siaran televisi di Indonesia (2022) oleh KPI menyimpulkan bahwa sebagian besar aspek telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, ada dua dimensi yang masih belum mencapai indeks kualitas yang diharapkan. Pertama, aspek norma kesopanan dan kesusilaan memiliki nilai 2.91, yang menunjukkan

bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam mengintegrasikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan dalam *variety show*. Kedua, dimensi perlindungan anak-anak dan remaja memiliki nilai yang lebih rendah, yaitu 2.69, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan bahwa *variety show* ini memberikan perlindungan yang memadai bagi audiens yang lebih muda. Berkaitan dengan aspek perlindungan anak-anak dan remaja, penting untuk mencatat bahwa pemahaman gender dalam *variety show* juga harus menjadi perhatian utama. KPI harus memastikan bahwa program *variety show* tidak hanya memenuhi standar normatif dalam hal kesopanan dan kesusilaan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kontennya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif dan pemahaman yang seimbang tentang gender, terutama bagi penonton muda yang masih dalam tahap perkembangan.



Gambar 1 Perbandingan Indeks Kualitas Program *Variety Show* Tahun 2017-2022
(sumber: KPI, 2022)

Secara normatif, KPI telah menyatakan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan gender, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Namun, dalam praktiknya, peran KPI dalam memastikan tayangan bebas dari bias dan stereotip gender masih mengalami tantangan signifikan. Data

dari *Indeks Kualitas Program Siaran* KPI tahun 2021 menunjukkan bahwa program variety show masih memiliki skor di bawah standar minimal dalam aspek norma kesopanan (2.91) dan perlindungan anak-anak dan remaja (2.69). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang belum terselesaikan antara regulasi dan implementasi kebijakan.

Salah satu contoh paling nyata dari problem representasi gender dalam program variety show adalah kecenderungan untuk menempatkan perempuan sebagai objek dalam sketsa atau adegan komedi yang sarat dengan nuansa seksisme. Praktik ini bukan sekadar kesalahan individual atau bentuk improvisasi komedi semata, melainkan mencerminkan struktur sosial dan budaya yang secara sistematis memungkinkan dan bahkan melegitimasi objektifikasi gender dalam media arus utama. Objektifikasi tidak hanya terjadi ketika tubuh perempuan menjadi pusat sorotan visual atau komentar seksual, tetapi juga ketika perempuan direduksi ke dalam peran simbolik—sebagai sumber tawa, lelucon, atau ketidaksengajaan yang "menghibur" (Fredrickson & Roberts, 1997).

Fenomena ini dapat dilihat dalam sejumlah episode variety show populer, seperti yang dikaji oleh Elisabeth & Adim (2022), yang menemukan bahwa mayoritas humor seksis dalam *Tonight Show NET.TV* ditujukan kepada perempuan. Bentuk humornya meliputi candaan tentang fisik, status pernikahan, hingga stereotip kecerdasan dan emosi perempuan. Jenis humor seperti ini menggunakan perempuan sebagai mekanisme untuk menciptakan suasana ringan, tetapi secara tidak sadar berkontribusi pada pelembagaan praktik misoginis dalam budaya populer. Alih-alih menantang norma, komedi semacam ini justru mengukuhkan gagasan bahwa merendahkan perempuan dapat diterima—selama dibingkai sebagai "lucu."

Hal yang lebih kompleks adalah ketika perempuan sendiri, termasuk komedian perempuan seperti Kiky Saputri, menjadi

bagian dari sistem ini. Dalam banyak konteks, perempuan tampil sebagai pelaku komedi yang mengolok-olok sesama perempuan atau bahkan dirinya sendiri. Fenomena ini tidak dapat serta-merta dibaca sebagai agensi bebas, melainkan sebagai bentuk *internalized sexism*—ketika perempuan mengadopsi pandangan patriarkal sebagai bentuk strategi bertahan dalam industri hiburan yang maskulin (Szymanski et al., 2011). Dalam konteks ini, perempuan tidak sekadar menjadi objek dari *male gaze*, tetapi juga agen yang—secara sadar atau tidak—memelihara logika seksisme kultural demi kelangsungan karier mereka di layar kaca.

Objektifikasi gender yang terjadi di variety show memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan opini publik. Tayangan-tayangan ini menjangkau jutaan pemirsa dan menjadi rujukan budaya populer yang kuat. Ketika perempuan terus-menerus direpresentasikan sebagai "bodoh", "ceroboh", atau hanya bernilai sejauh mereka tampil menarik dan emosional, maka penonton, khususnya generasi muda, akan menyerap nilai-nilai yang meminggirkan perempuan dari posisi intelektual, pemimpin, atau subjek aktif dalam masyarakat. Representasi ini memperkuat apa yang disebut Pierre Bourdieu (2001) sebagai *violence symbolique*—kekerasan simbolik yang dilembagakan dalam budaya, yang tak kasat mata tetapi sangat efektif dalam mempertahankan dominasi sosial.

Selain humor, eksploitasi kehidupan pribadi perempuan untuk hiburan, tanpa memperhatikan aspek etika dan perlindungan martabat individu, menjadi salah satu bentuk objektifikasi yang bertentangan dengan prinsip etika jurnalistik dan hak asasi manusia. Menurut Smaill (2010), bentuk eksploitasi semacam ini memperlihatkan bagaimana media hiburan sering kali menyajikan narasi emosional dan privat perempuan sebagai konsumsi publik, yang justru memperkuat representasi perempuan sebagai "makhluk sentimental dan lemah", alih-alih sebagai subjek sosial yang otonom.

Selain itu, beberapa *variety show* juga terkadang mengeksploitasi kehidupan pribadi perempuan dengan cara yang merugikan. Ini dapat mencakup pengungkapan detail pribadi atau penyajian cerita-cerita yang bersifat merendahkan, yang pada akhirnya dapat mengancam privasi dan harga diri individu tersebut. Contohnya adalah ketika acara tersebut mempublikasikan masalah pribadi seseorang, seperti perceraian atau masalah keluarga, tanpa pertimbangan yang memadai. Ini tidak hanya mengabaikan privasi individu tetapi juga dapat menghasilkan dampak emosional yang serius pada orang yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana perempuan sering kali didorong ke dalam ranah privat dengan menonjolkan kehidupan pribadi beserta kisah sedih mereka sebagai bahan hiburan.

Materi lainnya yang jamak ditemui adalah perempuan seringkali menjadi objek candaan kasar dalam program-program *variety show*. Misalnya, seorang peserta atau pembawa acara mungkin menggunakan bahasa kasar atau merendahkan lawan mainnya secara verbal, yang dapat menciptakan lingkungan yang kurang menyenangkan dan kurang mendidik bagi penonton. Semua permasalahan ini menunjukkan perlunya refleksi kritis dan perbaikan dalam menciptakan konten yang lebih inklusif, edukatif, dan menghormati semua individu, tanpa memandang gender atau karakteristik lainnya.

KPI, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekadar regulator teknis. KPI harus bertindak sebagai aktor kultural yang mampu mendorong transformasi sosial melalui kebijakan siaran yang tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga mempromosikan narasi alternatif yang lebih progresif dan adil gender. Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran P3SPS memang diperlukan, tetapi langkah lebih proaktif—seperti pelatihan bagi insan media tentang perspektif gender, penyusunan indeks kesetaraan gender dalam siaran, hingga kolaborasi

dengan organisasi perempuan—akan jauh lebih strategis dan berdampak luas. Dengan demikian, pengawasan representasi gender oleh KPI tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan evaluatif terhadap produk siaran, melainkan juga melalui pendekatan struktural dan ideologis yang mampu membongkar bias dan ketimpangan yang mengakar dalam industri penyiaran.

Male Gaze dan Representasi Gender dalam *Variety Show*

Dalam lanskap media hiburan Indonesia, *variety show* memegang peranan penting dalam membentuk budaya populer dan citra sosial aktor-aktor yang tampil di dalamnya. Namun, alih-alih menjadi ruang ekspresi yang transformatif, representasi aktris perempuan dalam program ini lebih sering terjebak dalam logika visual yang dikendalikan oleh *male gaze*—konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Laura Mulvey dalam esainya yang berjudul *Visual Pleasure and Narrative Cinema* (1975). Melalui kerangka ini, perempuan tidak tampil sebagai subjek aktif dengan agensi penuh, tetapi sebagai objek visual yang dikonstruksi demi kepuasan penonton laki-laki heteronormatif.

Male gaze dalam konteks *variety show* dioperasionalkan melalui berbagai strategi estetika dan naratif. Kamera sering menangkap tubuh perempuan dengan framing yang memusatkan pada penampilan fisik, gerak tubuh sensual, atau ekspresi emosional yang dilebih-lebihkan. Adegan-adegan ini jarang bersifat netral; mereka bekerja secara ideologis untuk menempatkan perempuan dalam posisi "terlihat", bukan "melihat"—sebuah posisi pasif dalam struktur visual. Sebagaimana dijelaskan Mulvey (1975), hal ini mereproduksi asimetri kekuasaan antara penonton laki-laki (sebagai subjek aktif) dan perempuan (sebagai objek keinginan).

Lebih jauh, representasi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari sistem ekonomi

media yang mengandalkan estetika seksualisasi untuk mendongkrak rating dan daya tarik komersial. Menurut Gill (2009), budaya visual kontemporer telah bergeser dari eksploitasi yang terang-terangan menuju bentuk *self-sexualization*, di mana perempuan diposisikan seolah-olah mereka memiliki agensi untuk "memilih" tampil seksi. Namun, klaim agensi ini bersifat semu karena tetap berlangsung dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh logika pasar dan struktur patriarki. Aktris perempuan dalam variety show sering kali didorong untuk tampil "cantik tetapi lucu", "cerdas tetapi tidak terlalu dominan", menciptakan dilema representasional yang sangat sempit.

Sebagai contoh, Enzy Storia atau Nunung mungkin dipandang sebagai simbol perempuan lucu yang menembus dunia komedi yang maskulin. Namun, kehadiran mereka seringkali tidak disertai dengan pelepasan dari ekspektasi gender tradisional. Karakter mereka diatur untuk tetap "dapat diterima secara sosial", baik melalui gestur tubuh, cara tertawa, atau peran naratif yang tetap menempatkan mereka sebagai pelengkap karakter utama laki-laki seperti Desta. Dengan kata lain, kehadiran mereka sering kali tidak membongkar logika maskulin, melainkan menyesuaikan diri ke dalamnya.

Pendekatan yang hanya menekankan pada representasi positif perempuan dalam variety show juga berisiko jatuh ke dalam jebakan *tokenism*, di mana satu atau dua figur perempuan "sukses" digunakan untuk menutupi struktur yang lebih luas dari eksklusi dan subordinasi. Seperti dikemukakan oleh Banet-Weiser (2018), retorika *empowerment* dalam media sering kali dikomodifikasi, diambil alih oleh logika neoliberalisme untuk menciptakan narasi "perempuan bisa sukses asal bekerja keras", tanpa menyentuh akar struktural dari ketidaksetaraan gender dalam industri hiburan itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan hal ini, maka penting untuk memahami bahwa persoalan representasi perempuan dalam variety show

tidak cukup diselesaikan dengan kehadiran lebih banyak aktris perempuan di layar. Yang lebih krusial adalah bagaimana struktur naratif, sudut pandang kamera, dan strategi produksi dikendalikan oleh logika *male gaze* dan kepentingan industri yang seksis. Tanpa perubahan struktural dalam proses kreatif dan industri media itu sendiri, kehadiran perempuan justru berisiko mengokohkan dominasi simbolik laki-laki, alih-alih menantanginya.

Dalam konteks ini, **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan isi siaran televisi, memiliki peran yang sangat penting. Namun sayangnya, KPI cenderung lebih menaruh perhatian pada norma "kesopanan" dalam pengertian moral konservatif—misalnya penggunaan pakaian terbuka atau kata-kata kasar—tanpa menyentuh lebih dalam logika ideologis yang menopang seksualisasi dan objektifikasi perempuan dalam tayangan hiburan. Ini merupakan bentuk pengawasan yang bersifat simptomatik, bukan struktural.

Padahal, KPI memiliki mandat normatif melalui *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)* untuk mendorong representasi yang adil, berimbang, dan bebas dari diskriminasi gender. Namun dalam praktiknya, lembaga ini belum menunjukkan keberpihakan kritis terhadap bagaimana *male gaze* direproduksi melalui mekanisme visual dan naratif media. Teguran terhadap konten yang eksplisit belum diikuti oleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana seksisme bekerja secara implisit, subtil, dan sistematis di ruang siaran.

Analisis indeks kualitas program siaran KPI tahun 2021 memperlihatkan bahwa variety show memiliki skor rendah pada aspek kesopanan (2.91) dan perlindungan anak (2.69). Namun laporan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana representasi gender berkontribusi terhadap rendahnya kualitas tersebut. Dengan kata lain, KPI belum menjadikan kritik feminis terhadap media sebagai dasar

analisis kultural yang serius. Hal ini sangat disayangkan, karena representasi gender dalam media bukan sekadar persoalan etika, melainkan persoalan struktural yang membentuk realitas sosial dan memengaruhi persepsi publik tentang relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan (Byerly & Ross, 2006).

Sebagai lembaga publik, KPI secara kritis harus mengevaluasi logika *male gaze* dalam variety show berarti membiarkan pola objektifikasi terus berlangsung tanpa kontrol institusional yang memadai. KPI cenderung bekerja secara teknokratik dan reaktif, bukan reflektif dan transformatif. Di saat media hiburan terus mengkapitalisasi tubuh perempuan sebagai elemen visual utama, ketiadaan regulasi yang berpijak pada analisis gender menjadikan KPI bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi.

PENUTUP

Variety show merupakan salah satu bentuk hiburan yang sangat populer di media penyiaran Indonesia. Namun, di balik daya tarik dan format yang ringan, program ini memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap gender. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa variety show mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan mendukung pemberdayaan perempuan, penting bagi media penyiaran dan lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk secara aktif mengawasi dan mengevaluasi representasi gender dalam program-program tersebut. Instrumen seperti Indeks Kualitas Program Siaran (IKPI) dapat menjadi alat penting dalam memantau berbagai aspek tayangan televisi, termasuk dimensi representasi gender.

Ketidakseimbangan representasi gender di media tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam dunia hiburan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial yang membatasi peran dan potensi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik secara luas.

Representasi yang bias dan stereotipikal memiliki dampak jangka panjang terhadap ekspektasi masyarakat, serta turut melanggengkan ketimpangan struktural yang sulit dideteksi secara kasat mata.

Lebih jauh, penting untuk mengakui bahwa ketimpangan representasi ini tidak hanya berlangsung melalui narasi verbal atau kuantitas keterlibatan perempuan, tetapi juga melalui dimensi visual yang sering kali tidak disadari. Dalam hal ini, konsep *male gaze* menjadi penting untuk dikedepankan sebagai kerangka kritik yang menyoroti bagaimana perempuan dalam variety show cenderung ditempatkan sebagai objek visual—baik melalui teknik pengambilan gambar, pemilihan busana, maupun framing naratif yang menekankan tubuh dan emosi perempuan semata. *Male gaze* bukan sekadar masalah estetika, tetapi merupakan mekanisme simbolik yang memperkuat dominasi laki-laki dalam wacana media.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan variety show yang inklusif tidak cukup hanya dengan menambah jumlah perempuan di layar, tetapi juga harus melibatkan perombakan terhadap logika visual dan naratif yang mendasari produksi media hiburan. Media penyiaran harus mampu menghadirkan representasi yang menantang norma gender konservatif dan membuka ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai subjek aktif, intelektual, dan berdaya. Dalam konteks ini, KPI perlu memperluas cakupan pengawasannya agar tidak hanya bersifat normatif dan reaktif terhadap pelanggaran eksplisit, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menindak bentuk-bentuk seksisme simbolik yang lebih halus namun berdampak luas. Akhirnya, variety show dapat bertransformasi dari sekadar hiburan massal menjadi ruang kultural yang mendorong kesadaran kritis dan perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih setara dan adil gender.

REFERENSI

Anderson, C. A., Suzuki, K., Swing, E. L., Groves, C. L., Gentile, D. A., Prot, S.,

- ... & Petrescu, P. (2017). Media violence and other aggression risk factors in seven nations. *Personality and social psychology bulletin*, 43(7), 986-998.
- Banet-Weiser, S. (2018). *Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny*. Duke University Press.
- Bignell, J. (2005). *Big Brother: Reality TV in the twenty-first century*. Springer.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford University Press.
- Byerly, C. M., & Ross, K. (2006). *Women and Media: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell.
DOI:10.1002/9780470774908
- Cohen, P. N., & Hilgeman, C. (2006). *Occupational ghettos: the worldwide segregation of women and men*.
- Coker, T. R., Elliott, M. N., Schwebel, D. C., Windle, M., Toomey, S. L., Tortolero, S. R., ... & Schuster, M. A. (2015). Media violence exposure and physical aggression in fifth-grade children. *Academic pediatrics*, 15(1), 82-88.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Elisabeth, R., & Adim, A. K. (2022). Representasi Humor Seksis Pada Program Tonight Show Di Net. tv. *eProceedings of Management*, 9(2).
- Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of Women Quarterly*, 21(2), 173–206.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>
- Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147–166.
<https://doi.org/10.1177/1367549407075898>
- Hether, H. J., & Murphy, S. T. (2010). Sex roles in health storylines on prime time television: A content analysis. *Sex roles*, 62, 810-821.
- Hidayat, T. W. (2015). Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 1(2).
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2022). *Indeks Kualitas Program Siaran Televisi*. Laporan
- Lauzen, M. M., Dozier, D. M., & Horan, N. (2008). Constructing gender stereotypes through social roles in prime-time television. *Journal of broadcasting & electronic media*, 52(2), 200-214.
<https://doi.org/10.1080/08838150801991971>
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Screen*, 16(3), 6–18.
<https://doi.org/10.1093/screen/16.3>.
- Retina Harahap, R. (2023). *Pelanggaran P3sps Dalam Program Reality Show (Study Analisis Isi Terhadap Reality Show “Brownis” Trans Tv)*. Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia

- Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
- Rusadi, U. (2002). *Diskursus kerusuhan sosial dalam media massa: Studi kekuasaan di balik sajian berita surat kabar*. Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Smaill, B. (2010). *The Documentary: Politics, Emotion, Culture*. Palgrave Macmillan.
- Surjadi, E., & Maharadja, A. D. (2011). *Gender skateboard:(kekuatan spirit gender dalam rumah tangga)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Susiana, S. (2016). Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Kajian*, 19(3), 219-234.
- Szymanski, D. M., Moffitt, L. B., & Carr, E. R. (2011). Sexual objectification of women: Advances to theory and research. *The Counseling Psychologist*, 39(1), 6–38. <https://doi.org/10.1177/0011000010378402>